Meutia Hatta : KPU Sangat Peduli Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.

Jakarta, Kpu.go.id. Workshop peran perempuan dalam Pemilu dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Provinsi dari unsur perempuan, yang berlangsung pada tanggal 1 Februari 2007, di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, di buka oleh Wakil ketua KPU Ramlan Surbakti. mulai pukul 11.00 Wib sampai dengan 19.35 wib dengan peserta Workshop perempuan semua, selain dihadiri oleh Menteri Negara (Meneg) Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono sebagai penyaji, juga dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia, Anggota DPR, Anggota DPD, unsur Partai Politik, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Mantan Meneg Pemberdayaan Perempuan Sulasikin Moerpratomo, Sri Rejeki dan unsur lainnya, seperti dosen, mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam Paparan singkatnya Meutia Hatta mengatakan sangat menghargai upaya KPU untuk mengevaluasi implementasi Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Pasal 65 (1) dan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai politik Pasal 7 dan Pasal 13 dalam upaya meningkatkan keterwakilan dan representasi perempuan di lembaga legislatif. Hal ini menunjukan bahwa KPU sangat peduli tentang keterwakilan perempuan dalam politik.

Lebih jauh Meutia mengatakan, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang masih paternalistis, dimana tokoh-tokoh panutan masih didominasi kalangan pria, keadaan ini membuat kaum perempuan harus bekerja keras untuk memasuki dunia politik. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan partai politik lebih meningkat. Sedangkan posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif memberi gambaran bahwa kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang memegang jabatan politis.

Menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak politik (memilih, dipilih dan menduduki jabatan publik/negeri) maka perlu terus ditingkatkan efektivitas dan intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dan LSM perempuan serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan publik/negeri perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

< p align=justify>Atas dasar kondisi tersebut, maka langkah-langkah yang harus ditempah antara lain : Pertama, meningkatkan komitmen pemerintah, DPR, pengurus parpol dan seluruh komponen bangsa dalam mengaplikasikan peraturan perundang-undangan politik dan kepegawaian secara konsisten; Kedua, melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan politik dan kepegawaian dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam kehidupan politik dan pemerintahan; Ketiga, meningkatkan pemahaman, kesamaan bahasa dan sensifitas gender bagi para penentu kebijakan di bidang politik dan pemerintahan; Keempat, memperluas jangkauan advokasi dan fasilitas kepada para penentu kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta seluruh komponen bangsa untuk mempercepat perwujudan KKG dalam berbagai aspek kehidupan.

Lampiran : Sambutan Meneg Perberdayaan Perempuan